

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi Politik

Strategi Politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Pengalaman membuktikan bahwa langkah semacam itu biasanya tidak direncanakan secara cukup matang, baik oleh partai politik maupun oleh pemerintah. Jika tidak demikian halnya, tidak mungkin ada begitu banyak proyek yang gagal. Dalam praktiknya, seringkali hasil proyek dan perencanaan yang demikian mengakibatkan masyarakat pertama-pertama berusaha memberikan perlawanan, kemudian tidak menaati peraturan, dan bahkan sama sekali tidak mengakui keberadaan peraturan tersebut – karena mereka berpendapat bahwa pemerintah terlalu lemah untuk menerapkan peraturan itu.²

Sebuah strategi adalah dampak dari langkah-langkah yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan dengan menjaga sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini yaitu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. strategi dapat diterapkan dalam membangun perekonomian, menyelesaikan konflik sosial, persaingan dalam bisnis,

² Schroeder, Peter, 2013, Strategi Politik, FNS, Jakarta, hlm. 7

akulturasi budaya, hingga membangun pertahanan negara. Berbagai strategi itu pun dapat diterapkan dalam bidang politik.

Perumusan strategi dapat dikemukakan dalam 4 komponen pokok, diantaranya yaitu, yang pertama adalah kesempatan lingkungan – apa yang mungkin dilakukan oleh organisasi, kemudian yang kedua adalah kompetensi dan sumber daya – apa yang secara realistis dapat dilakukan oleh organisasi, yang ketiga minat dan hasrat manajer – apa yang ingin dilakukan organisasi dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap masyarakat – apa yang seharusnya dilakukan organisasi. Pertimbangan mengenai masing-masing dan semua komponen ini hendaklah menghasilkan rencana strategi yang tangguh – rencana yang cukup besar kemungkinannya untuk sukses, pendekatan ini mencerminkan konsep-konsep sistem dan pandangan *contingency*, karena ia menunjukkan saling hubungan antara berbagai komponen.³

Dalam bidang politik, strategi dapat digunakan untuk membuat kebijakan untuk mengatur segala hal yang bersifat publik. Lalu kemudian diimplementasikan dan ditinjau kebijakan dari strategi tersebut dan kemudian diadakan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi kebijakan tersebut.

Peter Schroder (2013:42-44) menjelaskan secara umum bahwa perumusan strategi terbagi dalam tiga bagian.

³ Fremont E. Kast dan James E. Rosenweig, 1996, Organisasi dan Manajemen 2, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 697

a. Menyusun Tugas-Tugas

Menangani tugas-tugas sesuai dengan urutan akan menggarisbawahi signifikansi serangan di dalam pertimbangan strategis.

b. Merumuskan Strategi

Perumusan strategi secara keseluruhan harus mencakup kemungkinan-kemungkinan untuk membuat variasi.

c. Mengevaluasi Strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub-sub strategi maupun dalam strategi keseluruhan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi-strategi itu dirumuskan.

⁴Pengonsepan strategi direncanakan dalam tiga fase yang harus dijalankan secara berurutan. Pertama yaitu perumusan misi dan analisa situasi. Kedua, keputusan strategi, dan yang terakhir yaitu implementasi strategi. Dalam menjalankan langkah tersebut ada pertanyaan-pertanyaan berikut yang harus dijawab:

- a. Apakah yang seharusnya direncanakan, dan dengan tujuan strategis yang mana?
- b. Bagaimana kita menilai situasi dimana strategi akan dijalankan?
(analisa dan evaluasi strategi)

⁴ Peter Schroder, Strategi Politik, *op.cit.*, 35

- c. Keputusan strategis apa yang harus diambil agar strategi tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam situasi yang ada? (perumusan sub strategi)
- d. Tujuan taktis manakah yang harus dicapai untuk menjalankan strategi? (perumusan strategi)
- e. Bagaimanakah lingkungan internal dan eksternal mengenali atau mengidentifikasi strategi kita? (*target image*)
- f. Kelompok mana sajakah (internal dan eksternal) yang penting bagi pencapaian tujuan taktis, dan kelompok mana sajakah yang menaruh minat khusus terhadap kita – berdasarkan citra yang kita inginkan? (kelompok target)
- g. Faktor citra manakah yang penting bagi kelompok target tertentu? (pesan kelompok target)
- h. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita bersama kelompok target kita? (instrument kunci)
- i. Bagaimana kita menerjemahkan strategi kedalam perencanaan taktis? (rencana jadwal dan operasional)
- j. Instrument mana yang kita gunakan untuk mengontrol implementasi strategi dan untuk mendata perubahan-perubahan data lingkungan sehingga strategi dapat disesuaikan? (pengendalian strategi)

Pertanyaan-pertanyaan diatas dapat dijelaskan bahwa setelah betapa pentingnya faktor lingkungan baik dari internal maupun eksternal dalam

mengimplementasikan strategi. Setelah pertanyaan itu dapat terjawab maka strategi dapat dijalankan sesuai rencana yang disepakati sebelumnya.

Implementasi strategi memiliki beberapa factor yang perlu diperhitungkan diantaranya ialah factor manusia dan factor operasional. Sebelum implementasi strategi dilakukan, terlebih dahulu perlu diambil keputusan tentang tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrument-instrumen kunci. Kemudian pengendalian strategi juga perlu dilakukan untuk menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Ada dua unsur dalam pengendalian strategi, pertama yaitu unsur prinsip pengumpulan data. Hal ini perlu diperhatikan untuk memantau arus informasi secara terus-menerus setiap saat dimulai ketika pertama kali melaksanakan strategi. Kedua yaitu unsur prinsip keamanan dan perlindungan informasi. Hal ini diperlukan supaya informasi yang diberikan tidak salah paham dan dapat berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan strategi.⁵

2. Politik Pariwisata

Politik Pariwisata merupakan gabungan dua kata yang memiliki arti yang berbeda namun memiliki kaitan, yaitu politik dan pariwisata. Keduanya saling berkaitan karena suatu wilayah yang dipimpin oleh seseorang atau kelompok yang disini merupakan aktor politik dengan pariwisata yang didalamnya terdapat banyak pelaku utama untuk menjalankan kepariwisataan

⁵ Peter Schroder, Strategi Politik, *op.cit.*, hlm. 48-50

mulai dari masyarakat yang membuka usaha pariwisata sampai tatanan objek wisata serta program strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata dan semua itu diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang kemudian dilaksanakannya peraturan tersebut.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam sektor pariwisata melalui berbagai kebijakan. Ada prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pengambil kebijakan sektor publik disertai tujuan yang ingin dicapai dengan alasan politik, ekonomi dan moral sebagai latar belakang, dimana isu dan permasalahannya hanya dapat dikelola oleh pemerintah. Pentingnya peran pemerintah menjadi fakta yang tidak terelakkan di bidang pariwisata. Sektor ini tidak bisa bertahan hidup tanpanya. Hanya pemerintah yang memiliki kekuatan untuk memberikan stabilitas politik, keamanan dan kerangka hukum dan keuangan yang dibutuhkan sektor pariwisata. Pemerintah yang bertugas menyediakan layanan penting dan infrastruktur dasar.⁶

Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meletakkan landasan pengembangan industri pariwisata yang mengacu pada kepentingan nasional, dengan peran pemerintah optimal dalam menciptakan persaingan sehat. Dengan memberikan tekanan bagi pembangunan industri pariwisata berbasis sumber daya pariwisata, berupa sumber daya manusia, sosial, karya manusia,

⁶ Teguh Saparyan Dwi Sasongko, *"Kompleksitas Hubungan antara Pariwisata, Politik, dan Manajemen Sektor Publik"* JDP, Vol. 01 no. 01, 2014, hlm. 89

dan alam melalui pola pembangunan secara berkelanjutan yang sehat dan kompetitif.⁷ Hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik ditingkat desa sampai dengan tingkat daerah.

Salah satu strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata diantaranya adalah bahwa pada dasarnya daerah yang sudah berkembang perlu dikonsolidasikan, yang belum berkembang perlu dipacu dan yang sedang mulai berkembang didorong agar terus maju secara terarah dan terencana.⁸

Secara Etimologis, kata “Pariwisata” yang berasal dari bahasa Sanskerta, sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (Bahasa Belanda) atau “tourism” (Bahasa Inggris). Kata pariwisata dalam pengertian ini, sinonim dari kata “tour”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut: kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing – masing kata “pari” dan “wisata”.⁹

- *Pari*, berarti banyak, berkali – kali, berputar – putar, lengkap (ingat kata paripurna)
- *Wisata*, berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel”.

Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan disuatu destinasi, termasuk di Indonesia, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari peran para pelaku

⁷ Sedarmayanti, 2014, Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

⁸ Ibid. Hlm. 99

⁹ Oka A Yoeti, 1983, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung, hlm. 103

usaha dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang terlibat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepariwisataan yang ada di wilayah destinasi wisata itu sendiri. Mendasar pada Undang-undang nomor 10 Tahun 2009, paling tidak terdapat tiga komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu: (1) Pihak Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. (2) pihak swasta/industri, baik yang merupakan investor asing dan ataupun pelaku industri dalam negeri. (3) pihak masyarakat yang terkait, baik sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan maupun sebagai tuan rumah.¹⁰

Pengelolaan objek wisata sebaiknya memiliki standar tersendiri guna membuat objek wisata tersebut layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Standar yang dimaksud dalam hal ini adalah kelengkapan fasilitas umum, kenyamanan, keamanan, kemudahan jangkauan untuk dicapai, dan sebagainya. Menurut Oka A. Yoeti dalam jurnal yang di tulis oleh Yadi Kristian, berpendapat bahwa berhasilnya suatu pengelolaan objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenitis*).

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitan dengan judul “Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung” yang diteliti oleh Farida Robithoh Widyasti mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang

¹⁰ Bambang Sunaryo *op.cit.*, hlm. 116

mendeskripsikan pelaksanaan strategi promosi wisata; mendeskripsikan faktor pendukung strategi promosi wisata; menganalisis hambatan strategi promosi wisata; mendeskripsikan langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan strategi promosi wisata.

Kedua, penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja” yang diteliti oleh Hugo Itamar Mahasiswa Universitas Hasanudin pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang strategi yang telah direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tana Toraja dalam pengembangan pariwisata dan sejauh mana strategi ini telah berjalan; untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.

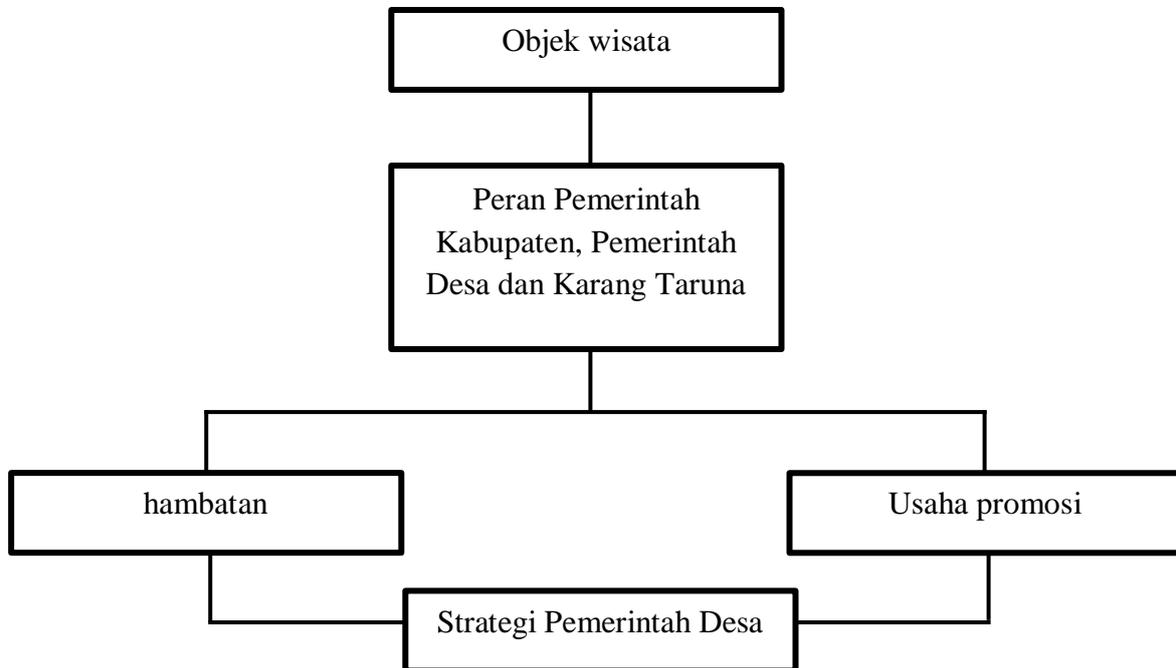
Ketiga, penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (Studi Kasus di Kabupaten Pangandaran)” yang diteliti oleh Khairunisa Afsari Nurfadilah Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan kemanfaatan pariwisata dengan gambaran strategi pengembangan pariwisata Pantai Pangandaran yang berbasis masyarakat atau komunitas.

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Farida Robithoh Widyasti	Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	Penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan pelaksanaan strategi promosi wisata; mendeskripsikan faktor pendukung strategi promosi wisata; menganalisis hambatan strategi promosi wisata; mendeskripsikan langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan strategi promosi wisata.	Penelitian ini membahas strategi promosi wisata di Kabupaten Temanggung dan membahas seluruh objek wisata di Kabupaten Temanggung	Persamaannya ialah sama – sama membahas strategi dari pemerintah setempat.
2.	Hugo Itamar	Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja	Penelitian ini membahas tentang strategi yang telah direncanakan dan dilakukan oleh Dinas	Dalam penelitian ini membahas strategi pengembangan pariwisata secara	Penelitian ini sama – sama membahas strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah

			Kebudayaan dan Pariwisata Tana Toraja dalam pengembangan pariwisata dan sejauh mana strategi ini telah berjalan;	keseluruhan di Kabupaten Tana Toraja.	setempat.
3.	Khairunisa Afsari Nurfadilah	Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (Studi Kasus di Kabupaten Pangandaran)	Penelitian ini menjelaskan kemanfaatan pariwisata dengan gambaran strategi pengembangan pariwisata Pantai Pangandaran yang berbasis masyarakat atau komunitas.	Pada penelitian ini menjelaskan tentang kemanfaatan dan pengembangan objek wisata berbasis masyarakat atau komunitas.	Sama-sama menjelaskan tentang suatu objek wisata dan strategi dari pemerintah setempat.

C. Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat ini wisata Situ Cisamping merupakan salah satu objek wisata baru di Kabupaten Pangandaran dan masih dalam tahap pengembangan untuk dikelola menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisata Situ Cisamping ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Desa Batukaras dan dibantu oleh Karang Taruna Jaya Giri.

Dalam pengembangan objek wisata ini terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi diantaranya adalah keterbatasan dana yang membuat pengembangan objek wisata ini menjadi terhambat, karena untuk saat ini untuk pengelolaan objek wisata Situ Cisamping ini sebagian besar masih mengandalkan dari pendapatan yang diperoleh dari wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kemudian juga perbedaan konsep dan

pendapat antara pihak Pemerintah Kabupaten dan Karang Taruna sendiri mengakibatkan ekspektasi yang diinginkan oleh Karang Taruna berbeda dengan realita yang terjadi.

Kemudian, disamping itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Desa Batukaras bersama dengan Karang Taruna setempat bersama-sama mempromosikan objek wisata Situ Cisamping yang salahsatu kegiatan promosi tersebut ialah diadakannya lomba lintas alam yang diadakan setiap tahunnya dan perlombaan tersebut sudah menjadi agenda tahunan. Dalam promosi wisata ini peran Pemerintah Kabupaten adalah sebagai nama lomba yang merebutkan Piala Bupati sebagai pendongkrak jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dan daya tarik tersendiri.

Pemerintah Desa dan Karang Taruna sebagai penyelenggara kegiatan lomba tersebut. Selain lomba sebagai promosi, juga gencar untuk memposting kegiatan pengunjung yang berkunjung ke objek wisata Situ Cisamping di media sosial seperti facebook dan instagram untuk mengenalkan objek wisata Situ Cisamping ke masyarakat luas. Setelah itu, maka dapat dilaksanakan strategi yang akan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun dari Pemerintah Desa Batukaras sendiri untuk membuat objek wisata Situ Cisamping ini menjadi objek wisata yang terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas.